PENGARUH PENERBITAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang)

RISTA NURMALA RAHAYU YUSUF – 21112237

Pembimbing

Wati Aris Astuti, SE., M.Si., Ak, CA

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
2017

Email :ristanurmala@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze Effect Warning Letter and Letter Forced to Tax Revenue. Factors tested in this study is the Warning Letter Publishing and Issuance of Disappearances as an independent variable, while the Tax Revenue as the dependent variable.

The method used in this study is the verification method. The population in this study is the Tax Office Pratama Soreang period 2011-2015. Sample selection technique used in this research was non probability sampling with purposive sampling method. While the methods of analysis used in this research is multiple linear regression analysis. The program used to analyze the data using the Statistical Package For Social Sciences (SPSS) V. 24.

Results of testing the hypothesis in this study indicate that the Warning Letter no significant effect on Tax Revenue while Letter Forced significant effect on Tax Revenue

Keywords: Warning Letter, Letter Forced and Tax Revenue.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pendapatan negara yang cukup potensial untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan. Penerimaan dari sektor pajak ternyata salah satu sumber penerimaan terbesar negara, dari tahun ke tahun terlihat bahwa penerimaan pajak terus meningkat dan memberi andil besar dalam penerimaan negara.

Penerimaan pajak diperlukan seiring dengan meningkatnya kebutuhan dana belanja rutin dan belanja modal pemerintah. Pajak bagi pemerintah tidak hanya merupakan sumber pendapatan, tetapi juga merupakan salah satu alat kebijakan untuk mengatur jalannya perekonomian. Dengan pajak pemerintah dapat mengatur alokasi sumber-sumber ekonomi, mengatur laju inflasi, dan sebagainya, oleh karena itu pajak mempunyai fungsi strategis dalam suatu negara.

Penerimaan pajak di Indonesia masih rendah dari yang ditargetkan turunnya penerimaan pajak tersebut salah satunya disebabkan rendahnya realisasi pajak (Bambang Brodjonegoro:2015). Segala upaya perlu ditingkatkan agar penerimaan negara dari sektor pajak dapat meningkat dari subjek maupun objek pajak yang ada (Gunaldi,2012). Besar kecil nilai pajak akan menentukan kapasitas anggaran dalam negri baik dalam membiayai pengeluaran, maupun biaya rutin negara (Mardiasmo:2009).

Penerbitan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis merupakan tindakan awal dari pelaksanaan penagihan pajak dan pelaksanaannya harus dilakukan sebelum dilanjutkan dengan penerbitan surat paksa. Sesuai dengan pasal 5 Keputusan Mentri Keuangan No. 561/KMK.04/2000, tindakan penagihan pajak diawali dengan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis oleh pejabat atau kuasa.

Penagihan menggunakan Surat Teguran dilakukan apabila WP tidak melunasi hutang pajak setelah 7 (tujuh) hari sejak SKP diterbitkan. Surat teguran atau surat peringatan yang dimaksudkan untuk mengatur wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 menyatakan bahwa surat teguran, surat peringatan dan surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi hutang pajaknya. Dengan meningkatnya jumlah surat teguran yang dibayar oleh wajib pajak maka diharapkan pencairan tunggakan meningkat dan dampaknya terhadap penerimaan pajak (Hidayat dan Cheisviyanny:2013)

Penagihan pajak dengan surat paksa merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat agar ikut berperan dalam pembangunan ekonomi. Pelaksanaan pembayaran pajak yang bertujuan untuk peningkatan ekonomi negara tersebut dapat dilakukan dengan baik apabila masyarakat sadar akan tanggung jawabnya.

Penerbitan Surat Paksa Pajak yang dilakukan kantor pelayanan pajak bertujuan agar wajib pajak dapat segera membayar utang pajaknya sehingga penerimaan pajak bertambah (paseleng dkk, 2013). Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan apabila wajib pajak atau penanggung pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana telah ditentukan dalam pemberitahuan sebelumnya (Surat Teguran), maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh jurusita pajak dengan menggunakan surat paksa yang diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan kepada penanggung pajak. Penagihan pajak dengan surat paksa ini dilakukan oleh jurusita pajak pusat maupun daerah. Apabila tidak juga melunasi sampai setelah surat paksa keluar, maka tindakan selanjutnya yaitu mengeluarkan surat sita, penyitaan, dan penggalangan.

Sebagai surat yang mempunyai kuasa hukum yang pasif, surat paksa tentu memiliki ciri-ciri dan kriteria tersendiri. Dalam undang-undang No. 19 Tahun 2000 sebagai perubahan atas undang-undang No.19 Tahun 1997 Pasal 7 Ayat 1 menyebutkan bahwa fisik dari surat paksa sendiri dibagian kepalanya bertuliskan “Demi Keadilan dan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan isi didalam nya memuat nama WP atau penanggung pajak, dasar penagihan, besar utang pajak dan perintah untuk membayar.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Masih ada wajib pajak yang sudah diberi surat teguran dua kali tidak menghiraukannya lalu Kantor Pelayanan Pajak memberikan surat ketiga yaitu surat paksa setelah itu baru wajib pajak bersedia membayar utang pajaknya.
2. Penerimaan pajak masih belum optimal karena mengalami penurunan.

1.3 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh surat teguran terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Soreang
2. Seberapa besar pengaruh surat paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Soreang

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mencari kebenaran atas pengaruh Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan cara pengamatan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

1.4.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah penerbitan surat teguran berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Soreang
2. Untuk mengetahui apakah penerbitan surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Soreang

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

1) Bagi Perusahaan

Penelitian ino diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kinerja perusahaan dimasa yang akan datang khususnya mengenai Pengaruh Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak.

2) Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber informasi yang dapat bermanfaat bagi pihak lain terutama untuk mengetahui lebih jauh tentang Pengaruh Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak.

1.5.2 Kegunaan Akademis

1) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penelitian sesuai dengan topic yang terkait tentang Pengaruh Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak.

2) Bagi Prodi Akuntansi Universitas Komputer Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi mahasiswa dan dapat menjadi bahan referensi, khususnya untuk mengkaji topik yang terkait serta memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan Akuntansi, Akuntansi Perpajakan dan ilmu lainnya yang terkait

3) Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk menciptakan ide-ide penelitian baru.

II. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak

Menurut Djajadiningrat (2013:2) mendefinisan pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Menurut Anderson (2013:35) mendefinisan pajak sebagai berikut :

"Pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran negara".

2.1.1.1 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan negara dan masyarakat, yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi Budgetair
   Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Regulerend
   Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

2.1.2 Surat Teguran

Pengertian Surat Teguran menurut Direktorat Jendral Pajak (2013:8) sebagai berikut :

"Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya setelah tanggal jatuh tempo pembayaran."

Menurut Haula dan Edi (2011:44) menjelaskan Surat Teguran adalah :

"Surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya".

Menurut Rusji (2012:22) definisi Surat Teguran adalah :

"Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak untuk mengatur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya ".

2.1.2.1 Indikator Surat Teguran

Menurut Dimas (2013), penerbitan surat teguran dilakukan pada seksi penagihan dengan prosedur sebagai berikut :

1. pelaksanaan pada Seksi Penagihan meneliti Surat Ketetapan Pajak (SKP)/Surat Tagihan Pajak (STP)/ Surat Tagihan Bea (STB) yang harus diterbitkan Surat Teguran dalam Sistem Administrasi Perpajakan dan meminta persetujuan Kepala Saksi dan Kemudian diteruskan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak melalui sistem informasi DJP.
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak memeriksa usulan penerbitan Surat Teguran dan memberikan persetujuan penerbitan melalui Sistem Informasi DJP.
3. Pelaksana melihat sistem informasi DJP dan memeriksa persetujuan penerbitan Surat Teguran dan menyampaikannya kepada kepala Seksi Penagihan.
4. Kepala Seksi Penagihan meneliti, memaraf Surat Teguran, dan menugaskan kepada Pelaksana untuk menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti, menandatangani Surat Teguran yang telah ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak, menatausahakan, dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak melalui Subbag Umum.

2.1.3 Surat Paksa

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:189) :

"Surat paksa adalah suatu surat ketetapan pejabat yang berwenang, yang mempunyai titel eksekutorial dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang mengandung perintah kepada Wajib Pajak yang namanya tercantum dalam Surat Paksa, untuk membayar sejumlah pajak yang disebut dalam Surat Paksa, dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Paksa, dengan ancaman sila atau sandera."

Menurut Prasetyo (2014:1) :

"Surat paksa dalam arti umum adalah alat hukum yang lazimnya diterapkan dalam hukum perdata setelah ada putusan hakim, sedangkan surat paksa dalam arti khusus adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat dalam hal ini yang berwewenag dalam menerbitkan surat paksa".

2.1.3.1 Indikator Surat Paksa

Pengertian Surat Paksa menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:189) sebagai berikut:

> "Surat paksa adalah suatu surat ketetapan pejabat yang berwenang, yang mempunyai titel eksekutor dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang mengandung perintah kepada Wajib Pajak yang mananya tercantum dalam surat paksa, untuk membayar sejumlah pajak yang disebut dalam Surat Paksa, dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat paksa, dengan ancaman sita atau sandera".

2.1.4 Penerimaan Pajak

Menurut Kementrian Keuangan Republik Indonesia (2009) ,menyatakan bahwa :

"Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan yang utama dalam APBN."

Pengertian Penerimaan Pajak Menurut Suryadi (2011:205)

"Penerimaan pajak adalah sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan".

Menurut John Hutagaol (2007:8) pengertian Penerimaan pajak adalah sebagai berikut :

"Penerimaan pajak adalah pengelolaan penerimaan pajak dilakukan melalui instrument kebijakan dan administrasi perpajakan."

2.1.4.1 Indikator Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:27) beberapa faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas Negra melalui pemungutan pajak kepada warga Negara yaitu:

a. Jumlah Penerimaan Pajak
   1. Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan
   2. kebijakan pemerintah dan mengimplementasikan undang-undang perpajakan
   3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat
   4. Pelayanan
   5. Kesadaran dan pemahaman warga negara
   6. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi).

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Penerbitan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Rudy Suhartono dan Wirawan B Ilyas (2010)

> "Penerbitan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis merupakan awal tindakan penagihan pajak sehingga hal tersebut menjadi pedoman tindakan penagihan pajak berikutnya yaitu penyampaian Surat Paksa dan sebagainya. Dengan mekanisme tersebut surat teguran dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak sehingga dapat bertambah sesuai target. "

Dan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Verliani Dasmaran,2015 menyatakan Surat teguran mempengaruhi penerimaan pajak sebesar 27,4% sisanya 72,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis.

2.2.2 Pengaruh Penerbitan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:121) Sebagai berikut:

> "Surat Paksa digunakan untuk melakukan penagihan atas utang pajak dan biaya-biaya penagihannya, dimana dengan adanya surat paksa WP di paksa untuk membayar tunggakan pajak sehingga dapat meningktkan penerimaan pajak."

Sedangkan keterkaitan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak menurut UU Tahun 2000 Tentang Penagiihan Pajak dengan Surat Paksa sebagai berikut:

> "Surat paksa digunakan untuk menagih wajib pajak yang menunggak pajak atau tidak membayar utang dan biaya penagihan pajak, apabila surat tersebut dipatuhi oleh wajib pajak dan wajib pajak tersebut membayar utang pajaknya otomatis akan mempengaruhi terhadap penerimaan pajak."

Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Dina Anggraeni, 2015) menyatakan bahwa surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak, meskipun masih ada sebagian kecil dari wajib pajak yang tidak melunasi utang pajak. Proses penagihan pajak degan kekuatan di Kantor Pajak Pratama Pekan baru masih mengalami banyak kendala.

2.3 Hipotesis

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut

H_1 : Penerbitan Surat Teguran berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.
H_2 : Penerbitan Surat Paksa berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

III. Metodologi Penelitian

3.1 Metode Penelitian

Menurut Sugiono (2010:2), mengenai metode penelitian adalah sebagai berikut :

"Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri – ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis".

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2010;147) megenai metode deskriptif ini diungkapkan bahwa:

"Metode deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data tengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan dengan yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif merupakan metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diselidiki dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan menginterprestasi data dalam pengujian hipotesis statistik.

Sedangkan metode verifikatif menurut Umi Narimawati (2010:29) mengungkapkan bahwa

"metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan ditempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan".

Metode penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hipotesisi dengan menggunakan perhitungan statistik. Penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak yang diteliti. Verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan menperjelas objek yang diteliti.

3.2 Oprasionalisasi Variabel

Berdasarkan judul penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel bebas / Independent Variable (X1 dan X2)
   Menurut Sugyono (2012:39), variabel bebas didefinisikan sebagai berikut :
   "Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terkait)".
   Data yang menjadivariabel bebas (Variabel X1) adalah Surat Teguran dan (Variabel X2) Surat Paksa.
2. Variabel terkait atau dependent
   Menurut Sugiyono (2010:40) menjelaskan bahwa
   "Variabel terkait adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas".
   Data yang menjadi variabel terkait adalah Penerimaan Pajak.

Penelitian menggunakan skala pengukuran guna menghasilkan data kuantutatif yang akurat dan tepat. Data kuantitatif adalah data dalam angka dan lambing matematika dan dengan kata lain dapat diukur dengan skala numerik (angka) (Tanjung dan Devi,2013:76). Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif (Sugiyono, 2013:92).

Skala pengukuran rasio mempunyai semua karakteristik yang dipunyai oleh skala nominal, ordinal dan interval dengan keindahan skala ini mempunyai 0 (nol) empiris absolut atau mempunyai titik awal nol yang berkaitan ketidak hadirannya suatu karakteristik yang sedang diukur. Pengukuran rasio biasanya dalam bentuk perbandingan antara satu individu atau objek tertentu dengan lainnya (Jonathan, 2012:71).

3.3 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2012:137) menyatakan bahwa sumber data sekunder adalah sebagai berikut :

> "Sumber data sekunder adalah sumber yang ridak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya dari pihak lain atau lewat dokumen."

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder berupa laporan realisasi ini adalah sumber data sekunder berupa laporan realisasi penerimaan pajak tahun 2011-2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

3.4 Populasi, Sampel dan Tempat serta waktu penelitian

3.4.1 Populasi

Sedangkan Pengertian Populasi menurut Andi Supangat (2010:3) adalah :
"Sekumpulan objek yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian (penelaahan) dengan diri mempunyai karakteristik yang sama".

Populasi dalam penelitian ini adalah Jumlah Surat Teguran dan Jumlah Surat Paksa Selama 5 tahun mulai dari tahun 2011 sampai tahun 2015 di KPP Pratama Soreang.

3.4.2 Penarikan Sampel

Penentuan jumlah sampel yang akan diolah dari jumlah populasi harus dilakukan dengan teknik sampling yang tepat. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik *purposive sampling*.
Menurut Sugiyono (2011:85) menyatakan bahwa *purposive sampling* adalah sebagai berikut :

> "*Purposive sampling* teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu"

Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa Laporan Penerimaan Pajak dari tahun 2011 sampai dengan 2015 yaitu 5 tahun terakhir (n=5) di KPP Pratama Soreang.

3.4.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, maka penulis mengadakan penelitian di KPP Pratama Bandung Tegallega yang berlokasi di Jl. Raya Cimareme No. 205 Ngamprah, Kab. Bandung Barat 40552 Telp. (022) 6868787. Dan pelaksanaan nya dari bulan September 2016 sampai maret 2017.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah sebabai berikut :

1 Penelitian Lapangan (Field Research)
Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di perusahaan yang menjadi objek penelitian. Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang diperoleh dengan cara :
   a. Observasi (Pengamayan Langsung)

Dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang untuk memperoleh data berupa laporan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2011-2015

b. Dokumentasi
Pengumpulan data dengan cara mencatat data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari dokumen-dokumen. Berdasarkan penelitian ini diharapkan akan memperoleh data mengenai Surat Teguran, Surat Paksa dan Penerimaan Pajak yang dimiliki Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

2 Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Penelitian kepustakaan dilakukan sebagai usaha guna memperoleh data yang bersifat teori sebagai pembanding dengan data penelitian dengan menggunakan berbagai literatur seperti buku, majalah, jurnal, dan laporan penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti tentang Surat Teguran, Surat Paksa dan Penerimaan Pajak.

3.6 Metode Pengujian Data

3.6.1 Rancangan Analisi

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif. Oleh karena itu analisis dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2011:31) mendefinisikan analisis kuantitatif sebagai berikut:

"Dalam penelitian kuantitatif analisis data menggunakan statistik. Statistik yang digunakan dapat berupa statistik deskriptif dan inferensial/idukatif. Statistik inferensial dapat berupa statistik parametris dan statistic nonparametris. Peneliti menggunakan statistic inferensial bila penelitian dilakukan pada sampel yang dilakukan secara random. Data hasil analisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan. Penyajian data dapat berupa tabel, tabel distribusi frekuensi, grafik garis, grafik batang, *piechart* (diagram lingkaran), dan pictogram. Pembahasan hasil penelitian merupakan penjelasan yang mendalam dan interpretasi terhadap data-data yang telah disajikan".

3.6.1.1 Uji Asumsi klasik

Menurut Ghozali, (2011:57) uji asumsi klasik digunakan untuk mendapatkan model regresi yang baik, terbebas dari penyimpangan data yang terdiri dari multikolonieritas, heteroskedassitas, autokorelasi dan normalitas. Cara yang digunakan untuk menguji penyimpangan asumsi kaslik sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Cara untuk mengetahui normalitas residual adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk suatu garis lurus diagonal, dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

Menurut Husein Umar (2011:181) dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymtotic Significance*), yaitu:

1. Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari populasi adalah normal.
2. Jika probabilitas < 0,05 maka populasi tidak berdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinieritas

Asumsi multikolinieritas menyatakan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinearitas. Gejala multikolinearitas adalah gejala korelasi antar variabel independen. Deteksi ada tidaknya multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF (Variable Inflation Factor) dan toleransi. Model regresi dikatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai VIF < 10, dan tolerance > 0,1 (10%). Sebagai dasar acuannya dapat disimpulkan:

1. Jika nilai toleransi > 10 persen dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.
2. Jika nilai tolerance < 10 persen dan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2011:65) uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda maka disebut heterokedastisitas. Untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas dalam persamaan regresi digunakan metode grafik dengan menggunakan plot untuk melihat ada tidaknya pola tertentu. Dasar pengambilan keputusannya adalah :

- jika ada pola tertentu seperti titik-titik (*point-point*) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas
- jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Pada pengujian autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada model regresi dan berikut nilai Durbin Watson yang diperoleh melalui hasil estimasi model regresi. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan perhitungan nilai statistik Durbin-Watson. Kriteria uji: bandingkan nilai D-W dengan nilai d dari tabel Durbin-Watson:

1) Jika D-W < dL atau D-W > 4 – dL, kesimpulannya pada data terdapat autokorelasi.
2) Jika dU < D-W < 4 – dU, kesimpulannya pada data tidak terdapat autokorelasi.
3) Tidak ada kesimpulan jika dL ≤ D-W ≤dU atau 4 – dU ≤ D-W ≤ 4-dL.

3.6.1.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan peneliti dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana hubungan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak. Menurut Sugiyono (2012:261) bentuk persamaan dari regresi linier berganda ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Penerimaan Pajak
X_1 = Surat Teguran
X_2 = Surat Paksa
α = Konstanta Intersep
β_1 = Koefisien regresi variabel Surat Teguran
β_2 = Koefisien regresi variabel Surat Paksa
ε = Tingkat kesalahan (*error term*)

Arti koefisien β menunjukan hubungan searah antara variabel bebas dengan variabel terikat jika bernilai positif (+). Dengan kata lain, peningkatan atau penurunan besarnya variabel bebas akan diikuti oleh peningkatan atau penurunan besarnya variabel terikat. Sedangkan jika nilai β negatif (-), menunjukan hubungan yang berlawanan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan kata lain, setiap peningkatan besarnya nilai variabel bebas akan diikuti oleh penurunan besarnya nilai variabel terikat dan sebaliknya. Selanjutnya untuk mengetahui apakah hubungan yang telah ada mempunyai kadar tertentu, maka harus melihat dua hal. Pertama, ada (dalam pengertian nyata atau berarti) atau tidak ada keterkaitan antara Penerimaan Pajak (Y) dan Surat Teguran (X_1) dan Penerimaan Pajak (Y) dengan Surat Paksa(X_2).

3.6.1.3 Analisis Korelasi

Analisis korelasi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui arah dan kuatnya hubungan antar variabel. Arah dinyatakan dalam positif dan negatif, sedangkan kuat atau lemahnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi. Nilai koefisien korelasi dapat dinyatakan $-1 \leq R \leq 1$ apabila:

1) Apabila (-) berarti terdapat hubungan negatif.
2) Apabila (+) berarti terdapat hubungan positif.

Interprestasi dari nilai koefisien korelasi adalah sebagai berikut:

1) Jika r = -1 atau mendekati -1, maka hubungan antara kedua variabel kuat dan mempunyai hubungan yang berlawanan (jika variabel independen naik, maka variabel dependen turun, dan jika variabel independen turun, maka variabel dependen naik).
2) Jika r = +1 atau mendekati +1, maka terdapat hubungan yang kuat antara variabel independen dan variabel dependen dan hubungannya searah (jika variabel independen naik, maka variabel dependen naik, dan jika variabel independen turun, maka variabel dependen turun).

3.6.1.4 Analisis Determinasi

Besarnya pengaruh Surat Teguran (X1) dan surat Paksa (X2) terhadap penerimaan pajak (Y) dapat diketahui dengan menggunakan analis koefisien determinasi atau disingkat Kd yang diperoleh dengan mengkuadratkan koefisien korelasinya yaitu :

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Sumber : Umi Narimawati (2010;50)

3.6.1.5 Pengujian Hipotesis

1. Pengujian Secara Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh signifikan secara parsial atau satu pihak dari masing-masing variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Hipotesis nol (H_0) tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan Hipotesis alternatif (H_1) menunjukkan adanya pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen, maka pengujian dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

(a) Menentukan hipotesis parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun hipotesis statistik yang akan di uji dalam penelitian ini adalah:

$H_0 : \beta = 0$: Surat Teguran tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak

$H_1 : \beta \neq 0$: Surat Teguran berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak

$H_0 : \beta = 0$: Surat Paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak

$H_1 : \beta \neq 0$: Surat Paksa berpengaruh signifikan Penerimaan Pajak

(b) Ditentukan dengan 5% dari derajat bebas (dk) = n – k – l, untuk menentukan t_{tabel} sebagai batas daerah penerimaan dan penolakan hipotesis. Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05 atau 5% karena dinilai cukup untuk mewakili hubungan variabel – variabel yang diteliti dan merupakan tingkat signifikasi yang umum digunakan dalam statu penelitian.

Menghitung nilai t_{hitung} dan membandingkannya dengan t_{tabel}. Adapun nilai t_{hitung}, dapat dicari dengan persamaan sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

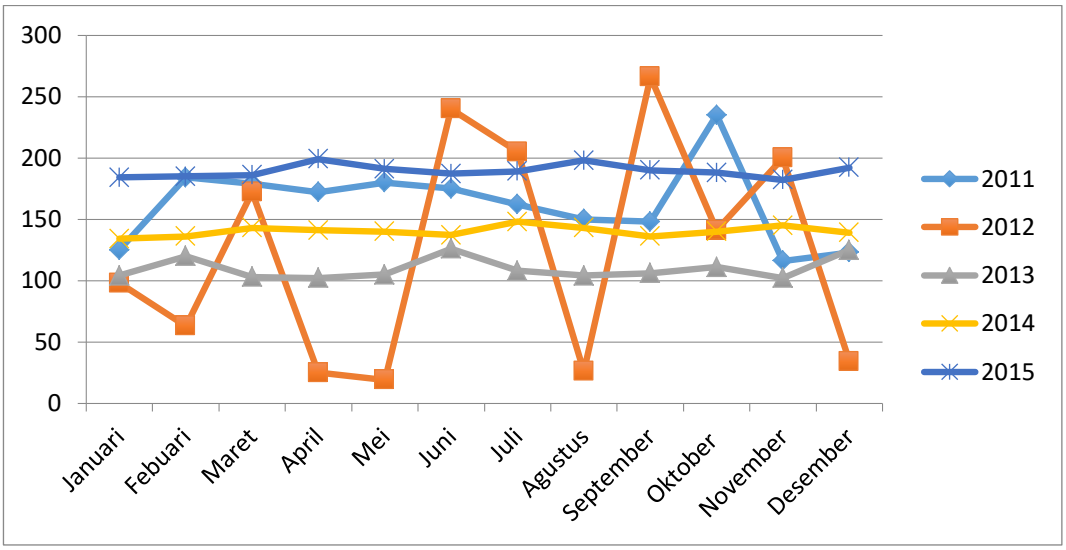
Sumber: Sugiyono (2012:230)

IV.

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif

4.1.1.1 Hasil Analisis Deskriptif Surat Teguran Periode Tahun 2011-2015

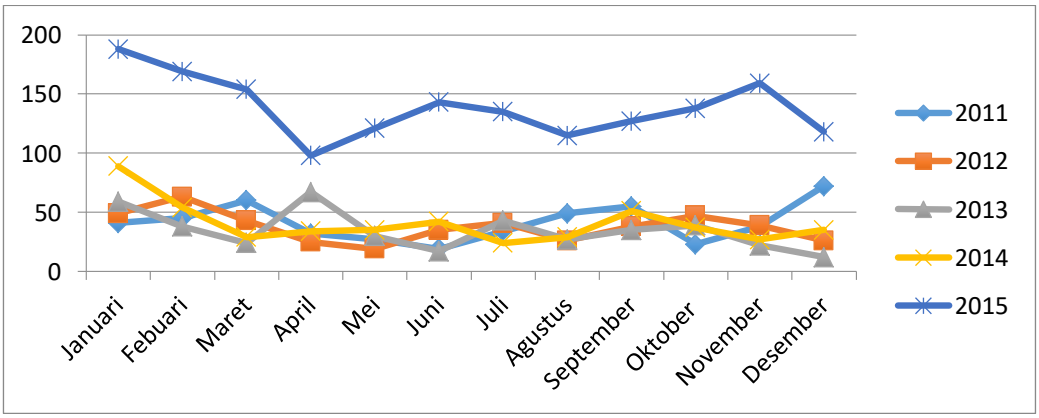


Gambar 4.1
Grafik Surat Teguran Tahun 2011-2015

Pada gambar grafik di atas dapat diketahui gambaran tentang Surat Teguran (X_1) dari tahun 2011 sampai 2015 mengalami fluktuasi. Jika dilihat rata rata setiap tahun nya yaitu tahun 2011 sebesar 162,42, 2012 sebesar 124,08 , 2013 sebesar 109.67 , 2014 sebesar 140.17 dan tahun 2015 sebesar 189.25 , dari fenomena yang terjadi bahwa Surat Teguran yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun demikian yang dapat dilihat pada gambar 4.1 bahwa pola data tiap bulan menunjukan kenaikan dan kenaikan tertinggi terjadi pada bulan September 2012. Tingginya kenaikan Penerbitan Surat Teguran karena masih rendahna kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga Penerbitan Surat Teguran selalu meningkat setiap tahunnya.

4.1.1.2 Hasil Analisis Deskriptif Surat Paksa Periode Tahun 2011-2015

Surat Paksa diterbitkan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan pajak jadi indikator surat paksa adalah jumlah surat paksa yang terbit dari tahun 2011-2015 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

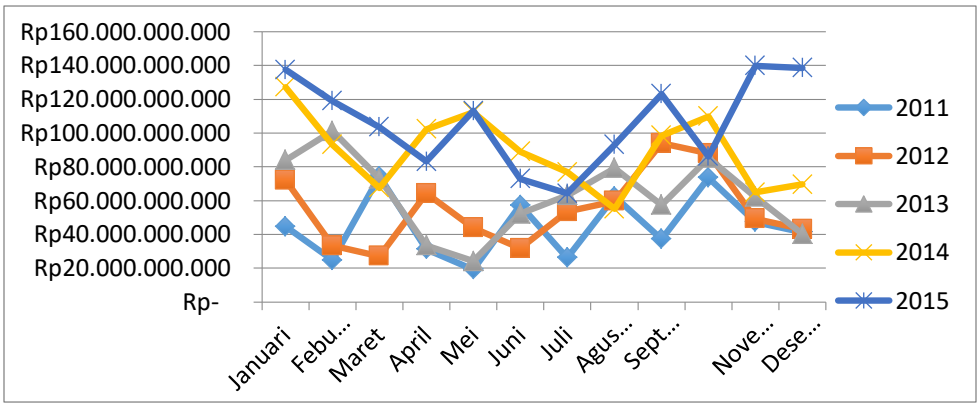


Grafik Surat Paksa Tahun 2011-2015

Pada gambar grafik diatas terlihat bahwa Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang pada tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi. Jika dilihat dari fenomena yang terjadi bahwa surat paksa yang diterbitkan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun demikian dapat dilihat pada gambar 4.2 bahwa pola data tiap bulan menunjukan kenaikan dan kenaikan tertinggi terjadi pada bulan Januari 2015. Tingginya kenaikan Penerbitan Surat Paksa disebabkan oleh masih adanya jumlah hutang pajak yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak sampai jatuh tempo yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak, artinya Surat Paksa yang diterbitkan belum efektif karena masih banyak Wajib Pajak yang tidak peduli dan cenderung melalaikan kewajibannya untuk melunasi hutang pajaknya walaupun sudah diterbitkan surat paksa.

4.1.1.3 Analisis Deskriptif Penerimaan Pajak Tahun 2011-2015

Berdasarkan Modul Penerimaan Negara pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang tahun 2011-2015,



Grafik Penerimaan Pajak Tahun 2011-2015

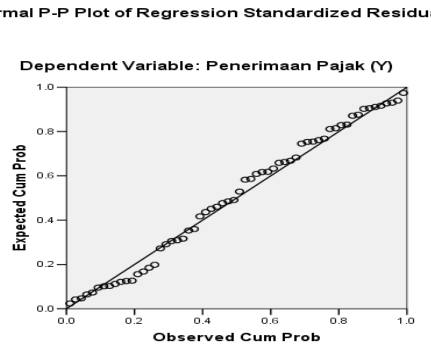
Pada gambar grafik diatas terlihat bahwa penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang pada tahun 2011-2015 mengalami flukuasi. Jika dlihat dari fenomena yang terjadi bahwa Penerimaan pajak pada Kantor zpelayanan Pajak Pratama soreang mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun demikian pada gambar 4.3 bahwa pola data setiap bulan menunjukan kenaikan dan kenaikan tertinggi terjadi pada bulan November 2015. Tingginya kenaikan penerimaan pajak disebabkan banaknya wajib pajak yang sudah sadar akan membayar pajak.

4.1.2 Hasil Verifikatif

4.1.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Mendeteksi suatu data berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui melalui dua cara, yaitu melalui analisis grafik dan analisis statistik. Gambar *P-P Plot* berikut akan menunjukkan hasil uji normalitas menggunakan analisis grafik.



***P-P Plot* Uji Normalitas Data**

Hasil uji normalitas menggunakan analisis grafik di atas menunjukkan bahwa titik-titik berada tidak jauh dari garis diagonal, hal tersebut menunjukkan bahwa data telah berdistribusi normal.

Untuk dapat lebih memastikan, selanjutnya digunakan uji *One-Sample* Kolmogorov-Smirnov terhadap data *unstandardized residual* pada tingkat signifikansi (*α*) sebesar 0,05. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, hal tersebut menunjukkan bahwa data telah berdistribusi normal (Ghozali, 2011:165).

Hasil Pengujian Asumsi Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	23.71760806
Most Extreme Differences	Absolute	.077
	Positive	.077
	Negative	-.067
Kolmogorov-Smirnov Z		.600
Asymp. Sig. (2-tailed)		.864

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

2. Uji Multikolinieritas

Dengan menggunakan bantuan aplikasi program SPSS didapat hasil estimasi nilai VIF masing-masing variabel bebas untuk uji multikolinieritas sebagai berikut:

Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Surat Teguran (X1)	.933	1.072
	Surat Paksa (X2)	.933	1.072

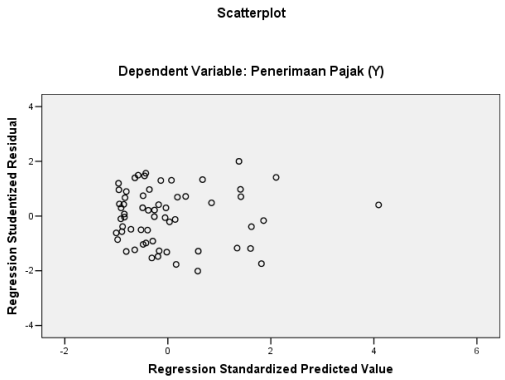
a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)

Hasil estimasi nilai VIF yang disajikan melalui tabel di atas menunjukkan bahwa nilai VIF masing-masing variabel bebas bernilai di bawah nilai kritis sebesar 10, yakni Surat Teguran (X_1) = 1,072,dan Surat Paksa (X_2) = 1,072. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

3. Uji Heteroskadastisitas

Hasil estimasi menggunakan bantuan aplikasi program SPSS yang disajikan melalui gambar *scatterplot* berikut akan menunjukkan hasil dari uji heteroskedastisitas melalui analisis grafik.

***Scatterplot* Uji Heteroskedastisitas**



Berdasarkan *scatterplot* di atas terlihat bahwa distribusi data *residual* tidak membentuk pola-pola tertentu, tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu *Y*, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Atau dengan kata lain, model regresi telah memenuhi asumsi homoskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Secara harfiah autokorelasi berarti adanya korelasi antara anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Dalam kaitannya dengan asumsi metode kuadrat terkecil (OLS), autokorelasi merupakan korelasi antara satu residual dengan residual yang lain. Sedangkan satu asumsi penting metode OLS berkaitan dengan residual adalah tidak adanya hubungan antara residual satu dengan residual yang lain.

Dengan menggunakan bantuan aplikasi program SPSS didapat hasil uji autokorelasi menggunakan statistik Durbin-Watson sebagai berikut:

Nilai Statistik Durbin-Watson

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.590[a]	.348	.325	25.87939	1.265

a. Predictors: (Constant), Surat Paksa (X2), Surat Teguran (X1)

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)

4.1.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Dengan menggunakan bantuan aplikasi program SPSS didapat hasil estimasi parameter regresi linier berganda sebagai berikut:

Nilai Koefisien Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	29.313	6.810		4.304	.000
	Surat Teguran (X1)	2.246	12.094	.022	.186	.853
	Surat Paksa (X2)	.995	.232	.505	4.283	.000

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)

Berdasarkan tabel di atas didapat nilai kontstanta dan koefisien regresi, sehingga dapat dibentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$\hat{Y}$ = 29,313 + 2,246X_1 + 0,995X_2+ e

Persamaan di atas dapat diartikan sebagai berikut:

a = 29,313 artinya jika variabel Surat Teguran (X_1), dan Surat Paksa (X_2) bernilai nol (0), maka variabel Penerimaan Pajak (Y) akan bernilai 29,313 satuan.Atau dengan pengertian lain, garis-garis regresi akan memotong sumbu *Y* di titik 29,313.

b_1 = 2,246 artinya jika variabel Surat Teguran (X_1) meningkat sebesar satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka variabel Penerimaan Pajak (Y) akan meningkat sebesar 2,246 satuan.

b_2 = 0,995 artinya jika variabel Surat Paksa (X_2) meningkat sebesar satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka variabel Penerimaan Pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,995 satuan.

4.1.4.1 Analisis Koefisien Korelasi Ganda dan Koefisien Determinasi

Dengan menggunakan bantuan aplikasi program SPSS didapat hasil estimesi koefisien korelasi ganda (*R*) dan koefisien determinasi (R^2) sebagai berikut:

Nilai Koefisien Korelasi Ganda dan Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.511[a]	.261	.235	24.13012	2.019

a. Predictors: (Constant), Surat Paksa (X2), Surat Teguran (X1)

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)

Berdasarkan hasil estimasi *R* dan R^2 yang disajikan melalui tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai *R* adalah sebesar 0,511

Berdasarkan tabel interpretasi koefisien korelasi yang disajikan pada tabel di atas, maka koefisien korelasi sebesar 0,511 menunjukkan adanya hubungan yang terkategori sedang antara variabel bebas secara simultan dengan variabel terikat.

Setelah diketahui nilai *R* sebesar 0,511, selanjutnya nilai persentase R^2 dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$KD = R^2 \times 100\%$

$= (0{,}511)^2 \times 100\%$

$= 26{,}1\%$

Nilai koefisien determinasi sebesar 26,1% menunjukkan bahwa secara simultan, Surat Teguran (X_1), dan Surat Paksa (X_2) memberikan kontribusi pengaruh sebesar 26,1% terhadap

Penerimaan Pajak (Y), sedangkan sisanya sebesar 73,9% merupakan kontribusi pengaruh variabel lain yang tidak diamati di dalam penelitian ini.

Untuk mengetahu besar pengaruh secara parsial dilakukan perkalian nila beta dengan zero order sebagai berikut:

Koefisien Determinasi Parsial

Coefficients[a]

Model		Standardized Coefficients	Correlations
		Beta	Zero-order
1	Surat Teguran (X1)	.022	.153
	Surat Paksa (X2)	.505	.511

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)

X_1 Terhadap Y = 0,022 × 0,153 = 0,003 = 0,3%
X_2 Terhadap Y = 0,505 × 0,511 = 0,258 = 25,8%

Perhitungan di atas menunjukkan bahwa secara parsial Surat Teguran (X_1) memberikan kontribusi pengaruh sebesar 0,3% terhadap Penerimaan Pajak (Y). dan Surat Paksa (X_2) memberikan kontribusi pengaruh sebesar 25,8% terhadap Penerimaan Pajak (Y).

4.1.4.2 Pengujian Hipotesis

Hipotesis uji:

$H_0 \rightarrow b_{YXi} = 0$ Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari Surat Teguran (X_1), dan Surat Paksa (X_2) secara simultan terhadap Penerimaan Pajak (Y);

$H_1 \rightarrow b_{YXi} \neq 0$ Terdapat pengaruh yang signifikan dari Surat Teguran (X_1), dan Surat Paksa (X_2) secara simultan terhadap Penerimaan Pajak (Y).

1. Pengujian Hipotesis Parsial

Hipotesis uji:

1) $H_0 \rightarrow b_{YX1} = 0$ Surat Teguran (X_1) tidak berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap Penerimaan Pajak (Y);

$H_1 \rightarrow b_{YX1} \neq 0$ Surat Teguran (X_1) berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap Penerimaan Pajak (Y).

2) $H_0 \rightarrow b_{YX2} = 0$ Surat Paksa (X_2) tidak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Penerimaan Pajak (Y);

$H_1 \rightarrow b_{YX2} \neq 0$ Surat Paksa (X_2) berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap Penerimaan Pajak (Y).

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Penerbitan Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil hubungan yang diperoleh antara Surat Teguran dengan Penerimaan Pajak adalah sebesar 0,003. Nilai koefisien kolerasi sebesar 0,511 menunjukkan adanya hubungan yang terkatagori sedang antara variabel bebas secara simultan dengan variabel terkait. Artinya semakin meningkat Surat Teguran maka Penerimaan Pajak akan meningkat.

Sementara berdasarkan perhitungan besar pengaruh dari variabel Surat Teguran dapat dilihat bahwa Surat Teguran hanya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Pajak sebesar 0,3% sedangkan sisanya 99,7 dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Faktor lain yang mempengaruhi penerimaan pajak bisa berasal dari wajib pajak yang karena kesadaran wajib pajak mempengaruhi penerimaan pajak artinya waib pajak yang mempunyau esadaran yang besar (tax consciousness) akan lebih patuh membayar pajak dan memenuhi kewajiban-kewajiban pajak (Mardiasmo 2001).

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fauziah (2014) yang menyatakan bahwa Surat teguran tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak

4.2.2 Pengaruh Penerbitan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak

Perhitungan di atas menunjukkan bahwa secara parsial Surat Teguran (X_1) memberikan kontribusi pengaruh sebesar 0,3% terhadap Penerimaan Pajak (Y). dan Surat Paksa (X_2) memberikan kontribusi pengaruh sebesar 25,8% terhadap Penerimaan Pajak (Y).Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak sebesar 0,258. Nilai kolerasi bertanda positif yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara variabel bebas dan terkait adalah searah. Artinya semakin menungkat Surat Paksa maka penerimaan Pajak akan meningkat Sementara berdasarkan perhitungan besar pengaruh dari variabel Surat Paksa hanya memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak sebesar 25,8% sedangkan sisanya 74,2dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dina Anggraeni, (2015) menyatakan bahwa surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak, meskipun masih ada sebagian kecil dari wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya.

V. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

1. Penerbitan Surat Teguran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang mengalami pertumbuhan setiap bulannya, namun jumlah Penerbitan Surat Terguran tersebut cenderung fluktuatif atau mengalami kenaikan dan penurunan setiap bulannya. Hal ini menyebabkan naik dan turun pula penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang. Penerbitan Surat Teguran tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.
2. Penerbitan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang secara rata-rata mengalami kenaikan dan penurunan. Dari hasil tersebut membuat penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang menjadi tidak konstan atau terkadang naik atau terkadang menurun penerimaannya. Surat paksa mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak.

5.2. Saran

5.2.1 Saran Operasional

1. Kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang bila memungkinkan lebih meningkatkan atau sebaiknya dilakukan penyuluhan ataupun sosialisasi guna meningkatkan pengetahuan kewajiban perpajakan pada masyarakat. Dengan meningkatkan pengetahuan kewajiban perpajakan pada masyarakat. Dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya, diharapkan agar terus mengawasi wajib pajak yang bermasalah terkait belum membayar atau melunasi kewajiban perpajakannya melalui Surat Teguran yang diterbitkan sehingga penerimaan Kantor Pelayanan Pajak juga semakin meningkat.
2. Kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang agar terus mengawasi wajib pajak yang bermasalah terkait belum membayar atau melunasi kewajiban perpajakannya melalui Surat Paksa yang diterbitkan, selain itu untuk petugas perpajakan agar mensosialisasikan mengenai pentingnya perpajakan secara berkala, agar wajib pajak yang kurang paham dapat mengerti pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan Negara.

5.2.2 Saran Akademik

Dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi pajak diharapkan hasil ini dapat dijadikan acuan agar kedepannya peneliti lain dapat menggunakan variabel yang sama, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda atau mencari variabel lain yang mempengaruhi penerimaan pajak seperti ekstensifikasi atau intensifikasi pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Agustinis Paseleng, A.T. Poputra, SJ. Tangkuma(2013),Efektifitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado

Andi Supangat 2010 Statistika : Dalam Kajian Deskriptif, inferensial dan Nonparametik Edisi 1 . Jakarta : Kencana

Djajadiningrat 2011 . Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat .

Direktorat Jendral Pajak. 2012. *Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negri Tahun 2012*. http//www.pajak.go.id

Direktorat Jendral Pajak 2013. *Modul Pembimbingan On The Job Traning Juru Sita Pajak Negara. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan*, Jakarta.

Direktorat Jendral Pajak. 2013. *KUP Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. E-Book* . Direktorat Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat, Jakarta Selatan

Ghozali, Imam 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.* Semarang: Universitas Diponogoro.

Keputusan Mentri Keuangan Repubik Indonesia No. 561/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus Serta Pelaksanaan Surat Paksa.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan. Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : Penerbit ANDI.

Munawir, S, 2003, Pajak Penghasilan. Edisi Pertama. Yogyakarta : Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi.

Paseleng, Agustinus, Agus T. Poputra, dan Steven J. Tangkuman. 2013. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Jurnal EMBA Vol.1 No 4 Desember 2013, Hal. 2371-2381

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Pustaka.

Rochmat Soemitro (2012). *Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan* . Bandung : Graha Ilmu.

Siahaan, Marihot P.SE, 2004. Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada.

Suparmoko, dan Maria R. Suparmoko, 2000. *Pokok-Pokok Ekonomika*, Yogyakarta: Penerbit BPFE.

Suparmono, dan T.W Damayanti, 2010. *Perpajakan Indonesia*. Mekanisme dan Perhitungan. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Cv. Andi Offset.

Sumarsan, Thomas, 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 3. Jakarta : PT. Indeks.

Sultoni, 2013. PMK 16/PMK.03/2013 Makin Meneguhkan DJP. Dikutip dari www.pajak.go.id

Suhartono, Rudi dan Wirawan B Ilyas, 2010. *Panduan Komprehensif dan Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&B* , Bandung: Alfabeta.

Suandy, Erly. 20012. *Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.

Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan* Cetakan kesembilan. Bandung: Alfabeta

Undang-undang No. 19 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat (10) Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Undang-undang No.19 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat (12) Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 7 ayat 1 dan 2

Undang – Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Umi, Narimawati, 2010, *Riset manajemen dan sumber daya manusia* . Jakarta: Agung Media

Verliani Dasmaran 2015, Pengaruh Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang.